

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1997. *Sosiologi Kriminalitas*. Remadja Karya, Bandung.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Ali, Achmad. 1998. *Menguak Tabir Hukum, Edisi Pertama*. Pustaka Prima, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi. 1991. *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bahan Seminar Kriminologi*. UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1975. *Dari Pemenuhan ke Pembinaan Narapidana*. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Carolina, Afni. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum UI, Jakarta. Tesis tidak dipublikasikan.
- Chazami, Adawi. 2008. *Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Darmawan, Mohammad Kamal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soerjono. 1985. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung.



Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 7 ayat (2)

PP Menteri Hukum dan HAM RI No. MH.H.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.